

**HASIL PEMETAAN PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TAHUN  
DI 6 KECAMATAN DI KABUPATEN GARUT**

**MAKALAH**

Disampaikan dalam Seminar Hasil Pemetaan dan Pendataan  
Program Wajar Dikdas di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Garut  
tanggal 21-22 Agustus 2007

oleh

**HERNAWAN, S.Pd.  
NIP 132306424**

**SEMINAR HASIL PEMETAAN PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TAHUN  
KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2007**

## HASIL PEMETAAN PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TAHUN DI 6 KECAMATAN DI KABUPATEN GARUT <sup>1</sup>

Hernawan, S.Pd.<sup>2</sup>

### A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor utama yang sangat menentukan kualitas masyarakat. Selain itu juga, pendidikan merupakan suatu investasi bagi pembangunan bangsa kita sekarang ini. Dengan kebudayaan yang terus berkembang, maka pendidikan berperan penting dalam menentukan kualitas manusia itu sendiri. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini ditegaskan lebih rinci dalam BAB XII Pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: (1). “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, dan (2). “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Berdasarkan keterangan di atas, maka pemerintah memiliki tanggungjawab yang mendasar untuk mencerdaskan bangsanya seoptimal mungkin.

Salah satu kebijakan pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia dan mendapatkan perhatian khusus adalah penuntasan wajib belajar sembilan tahun, yaitu wajib belajar pada tingkat SD sampai SMP. Pencanaan Wajar Dikdas sembilan tahun merupakan salah satu kegiatan pokok yang terdapat dalam APBN 2001 (Tilaar, 2002:70). Wajar Dikdas sembilan tahun merupakan produk kebijakan publik, sebagai program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan yang terarah.

Adapun landasan kebijakannya berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1994 yaitu: “Wajib Belajar Sembilan Tahun adalah suatu gerakan nasional yang diselenggarakan diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi warga negara yang berusia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan atau pendidikan setara sampai tamat”. Hal tersebut tertuang pula dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 Ayat (18), pasal 6 Ayat (1) dan pasal 34 Ayat (1).

---

<sup>1</sup> Judul makalah yang disampaikan dalam Seminar Hasil Pemetan dan Pendataan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tanggal 21-22 Agustus 2007.

<sup>2</sup> Dosen FPBS Universitas Pendidikan Indonesia

Penduduk Indonesia saat ini jika dikaji dari pendidikan masih sangat mengkhawatirkan, bahkan di beberapa wilayah Indonesia tidak sedikit yang masih buta huruf. Banyak sekali alasan yang melatarbelakangi hal ini, baik itu kondisi ekonomi, kurangnya motivasi, letak geografis, ataupun faktor lainnya yang kurang mendukung. Untuk menanggulangi masalah tersebut Indonesia menggalakkan wajib belajar sembilan tahun, tapi dalam pelaksanaannya belum optimal dan masih sangat jauh dari harapan. Walaupun demikian program ini masih terus dilaksanakan, dan pemerintah sedang merencanakan untuk meningkatkannya menjadi wajib belajar dua belas tahun. Dengan diadakannya wajib belajar dua belas tahun, diharapkan mutu pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik.

Dalam meningkatkan HDI (Human Development Indeks), salah satu variabel yang mempengaruhinya adalah pendidikan. Banyaknya persoalan yang menjadi hambatan bagi pembangunan bangsa Indonesia dalam setiap aspek kehidupan, kecenderungan diakibatkan oleh tingkat kompleksitas persoalan pada dunia pendidikan. Salah satu komponen hasil penilaian yang menjadi indikator sulitnya meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), adalah masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), masih rendahnya tingkat rata-rata lama sekolah dan rendahnya kualifikasi hasil lulusan sekolah pada tiap jenjang. Dilihat dari kualitas hasil lulusan pada penguasaan dan pemahaman bidangnya, yang akhirnya hasil lulusan tidak memiliki daya saing dan keterampilan, sehingga berdampak pada relevansi pendidikan yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran pada masyarakat terpelajar. Masalah tersebut di atas, tentunya mesti diantisipasi dengan resolusi dan revitalisasi secara efektif dan efisien. Upaya yang dipandang relevan untuk ditempuh adalah dengan meningkatkan peran-peran masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pendidikan yakni; meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Secara yuridis sebagai bentuk kebijakan pemerintah yaitu; dengan digulirkannya program wajib belajar sembilan tahun, yang harus menjadi pusat perhatian bersama. Upaya dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun ditempuh dalam dua jalur

pendidikan formal dan non formal. Pada pendidikan formal upaya dalam meningkatkan rata-rata lamasekolah adalah dengan diberlakukannya “wajib belajar sembilan tahun” yaitu pendidikan dasar diselesai dari kelas (satu) SD sampai dengan kelas (sembilan) atau kelas (tiga) SLTP. Sedang pada pendidikan PLS (Pendidikan Luar Sekolah) yang berperan sebagai pengganti dalam pendidikan formal, wajib belajar sembilan tahun diselenggarakan dalam bentuk kejar paket A dan B sebagai bentuk penyetaraan yang berperan menjadi jalur pendidikan alternatif dari pencapaian pemerataan pendidikan dan peningkatan rata-rata lam sekolah guna tercapainya pembangunan suberdaya manusia yang berkualitas.

Pendidikan adalah salah satu unsur vital bagi pembangun bangsa yang harus tetap menjadi prioritas utama karena pendidikan merupakan aset dasar bagi upaya bangsa kita dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara Yuridis dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam Pasal 1 dinyatakan *bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.* Sejak dikeluarkannya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disebutkan dalam BAB IV pasal 6 ayat 1 bahwa “Setiap Warga Negara yang Berusia 7–15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”, maka program pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia ditingkatkan dari *universal basic education* menjadi *cumpolsary education*. Ini berarti konsekuensinya adalah perlu adanya sanksi bagi yang tidak mau melaksanakan tanggung jawabnya baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua mau pun peserta didik.

Pendidikan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali bagi unsur dan lapisan masyarakat Indonesia tertentu. Artinya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa *pelaksanaan pendidikan dasar menjadi kewajiban pemerintah daerah Kabupaten/Kota.* Oleh karena itu penuntasan wajib belajar

sembilan tahun perlu kerjasama sinergis antara pemerintah pusat , pemerintah daerah propinsi dan pemerintah kabupaten /kota. Dan ini dijelaskan juga dalam UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam Pasal 34 (3) *bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.* Ini juga Di pertegas lagi dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Pembangunan Nasional yang menyebutkan *bahwa pengembangan pendidikan dilaksanakan selain kerjasama sinergis antara pihak pemerintah juga mengoptimalkan peran serta masyarakat.* Dimana di dalam UU Sisdiknas juga yang dinyatakan pada Pasal 8 dijelaskan *bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.* Juga dalam Pasal 54 dinyatakan *bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, Keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.*

## **B. Pemetaan Program Wajar Dikdas**

### **1. Profil dan Pemetaan Kecamatan Kersamanah**

Kecamatan Kersamanah merupakan kecamatan termuda di kabupaten Garut. Kecamatan Kersamanah merupakan hasil pemekaran kecamatan pokok yaitu Kecamatan Cibatu. Kecamatan ini dibentuk sesuai dengan peraturan daerah Kab. Garut Nomor 2 Tahun 2004 tentang pembentukan Kecamatan di Kabupaten Garut yang secara resmi terhitung sejak tanggal 11 Maret 2004.

Pemekaran Kecamatan Cibatu tersebut memiliki tujuan, yaitu untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Dengan adanya pelaksanaan tugas-tugas diatas, seorang camat yang berperan sebagai perangkat daerah mendapat pelimpahan sebagian wewenang yang diberikan oleh Bupati Garut melalui Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 524 tahun 2001.

Kecamatan Kersamanah memiliki lima desa dengan jumlah sarana pendidikan yaitu sebagai berikut:

1. Desa Kersamanah : Memiliki 5 SD/MI 2 SMP dan 1 SMA
2. Desa Sukamaju : Memiliki 6 SD/MI dan 1 MTs
3. Desa Girijaya : Memiliki 4 SD/MI 1MTs
4. Desa Nanjungjaya : Memiliki 4 SDMI 1 SMP
5. Desa Sukamerang : Memiliki 4 SD 1 SMP

Keadaan wilayah atau geografis kecamatan Kersamanah sebagian besar berupa tanah sawah dan yang lainnya berupa tanah daerah yang berbukit, terletak di jalur jalan raya yang menghubungkan kecamatan Limbangan dengan kecamatan baypngbong dan Kabupaten Tasikmalaya. Dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Wado Kabupaten Sumedang
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Cibatuh
3. Sebelah Timur : Kecamatan Malangbong
4. Sebelah Barat : Kecamatan Limbangan

### 1.1. Desa Kersamanah

Desa Kersamanah memiliki lima Sekolah Dasar dan satu Madrasah Ibtidaiyah. Sasaran dari pendataan ini adalah siswa kelas 1-6 SD. Dalam program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun), Sekolah Dasar merupakan titik awal dimulainya pendidikan formal bagi anak. Berikut ini adalah hasil analisa terhadap SD yang ada di Desa Kersamanah.

#### a. Analisis Jumlah Siswa SD

No.	Nama SD/MI/Sederajat	Jumlah Siswa SD/MI/Sederajat		
		Seluruhnya	Usia 7-12 th	Dibawah/Diatas 7-12 th
1	SDN Kersamanah I	324	306	18
2	SDN Kersamanah II	149	139	10
3	SDN Kersamanah III	412	412	-
4	SDN Kersamanah IV	150	150	-
5	SDN Kersamanah V	286	286	-
6	MI Panamur	69	69	-
<b>Jumlah</b>		1390	1362	28

#### Temuan :

- Rata-rata siswa sekolah dasar berusia 7-12 tahun.

- Dari enam sekolah tingkat dasar yang terdapat di desa kersamanah terdapat 28 anak atau sekitar 2%-nya berusia di bawah/di atas 7-12 tahun.
- Dari 9336 jiwa penduduk desa kersamanah 1366 jiwa diantaranya adalah penduduk usia 7-12 tahun. Hal ini berarti seluruh penduduk desa kersamanah yang berusia 7-12 tahun duduk di bangku sekolah.

**b. Analisis Minat Siswa Kelas 6 SD Melanjutkan ke SMP**

No	Nama SD/MI/sdrjt	Angka kelulusan Th 2006/2007			Angka melanjutkan 2006/2007		
		Peserta ujian	Lulus		Lulus 06/07	Melanjutkan ke SMP/MTs/Sdrjt	
			orang	%		orang	%
1	SDN Kersamanah I	57	57	100	57	55	96,5
2	SDN Kersamanah II	21	21	100	21	21	100
3	SDN Kersamanah III	73	73	100	73	73	100
4	SDN Kersamanah IV	25	25	100	25	25	100
5	SDN Kersamanah V	47	47	100	47	47	100
6	MI Panamur	17	17	100	17	17	100
<b>JUMLAH</b>		240	240	100	240	238	

Desa Kersamanah merupakan Desa yang memiliki jumlah penduduk usia sekolah yang tergolong banyak dibandingkan dengan desa lain.

**Temuan :**

- Angka kelulusan untuk tingkat sekolah dasar desa kersamanah mencapai seratus persen.
- Dari 240 siswa yang lulus SD tahun pelajaran 2006/2007 98,25% diantaranya melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah.
- Dari hasil kunjungan ke semua SD dan MI yang ada di Kersamanah ternyata semua siswa kelas 6 memiliki antusias dan minat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini

mengartikan bahwa penduduk Kersamanah telah memahami pentingnya pendidikan dasar demi kelangsungan masa depan putra-putrinya

### c. Analisis Jumlah SD/MI/Sederajat

No.	Nama SD/MI/Sederajat	Jumlah Siswa SD/MI/Sederajat		
		Seluruhnya	Usia 7-12 th	Dibawah/Diatas 7-12 th
1	SDN Kersamanah I	324	306	18
2	SDN Kersamanah II	149	139	10
3	SDN Kersamanah III	412	412	-
4	SDN Kersamanah IV	150	150	-
5	SDN Kersamanah V	286	286	-
6	MI Panamur	69	69	-
<b>Jumlah</b>		1390	1362	28

Berdasarkan data diatas terdapat lima sekolah dasar dan satu Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Desa Kersamanah. Lima SD tersebut berstatus negeri sedangkan untuk MI berada di bawah Yayasan Pendidikan Islam Kurnia (Yapika).

#### Temuan :

- Persebaran Siswa Usia 7-12 tahun disetiap SD didesa kersamanah belum merata hal ini tergantung pada jumlah penduduknya disekitar SD tersebut.
- Pada SDN Kersamanah I, III dan V mengindikasikan bahwa jumlah siswa melebihi kapasitas atau daya tampung ideal ruang kelas yang idealnya setiap kelas berisi 25-30 siswa agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan efektif.
- Lain halnya dengan MI Panamur yang jumlah siswanya dibawah rata-rata jumlah siswa SD yang ada di Kersamanah
- kebanyakan orang tua di Desa Kersamanah lebih mempercayakan putra-putrinya untuk bersekolah di Sekolah Dasar.



### Alternative Solusi :

- Penambahan unit kelas baru untuk mencapai daya tampung siswa yang ideal sehingga belajar akan kondusif dengan cara mengajukan proposal ke insatansi atau dinas terkait .
- Pemotivasian kepada orang tua bahwa pembelajaran di madrasah ibtidaiyah tidak jauh beda dengan sekolah dasar biasanya
- Peningkatan mutu pembelajaran di madrasah ibtidaiyah dan sarana-prasarana agar timbul ketertarikan dari masyarakat untuk meyekolahkan anaknya di satuan pendidikan tersebut

### d. Hasil Perhitungan APK dan APM SD Desa Kersamanah

#### 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD

Dari data yang telah dikumpulkan, diperoleh :

Jumlah siswa di jenjang pendidikan SD : 1390

Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun : 1366

$$\text{APK SD} = \frac{\text{Jumlah siswa di jenjang pendidikan SD}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 th}} \times 100\%$$

$$\text{APK SD} = \frac{1390}{1366} \times 100\% = 101,76\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SD sebesar 101,76%. Angka 101,76% ini menunjukkan semua penduduk yang berada pada kelompok usia 7-12 tahun (100%) berada di bangku sekolah, sedangkan sisanya (1,76%) adalah siswa SD yang berada di luar usia resmi SD (7-12 tahun) atau berasal dari luar Desa Kersamanah. Berarti tingkat partisipasi penduduk Desa Kersamanah tergolong tinggi, karena seluruh penduduknya terutama yang ada pada usia 7-12 tahun mengenyam bangku sekolah.

## 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD

Dari data yang telah dikumpulkan, diperoleh :

Jumlah siswa kelompok usia 7-12 th di jenjang pendidikan SD : 1363

Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun : 1366

$$\text{APM SD} = \frac{\text{Jumlah siswa kel. Usia 7-12 th di jenjang pendidikan SD}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 th}} \times 100\%$$

$$\text{APM SD} = \frac{1363}{1366} \times 100\% = 99,78\%$$

Dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa angka partisipasi murni sekolah dasar sebesar 99,78%, berarti tingkat partisipasi masyarakat Kersamanah tergolong tinggi.

## Hasil Perhitungan APK dan APM SMP/MTs/Sederajat

### 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat

Dari data yang telah dikumpulkan, diperoleh :

Jumlah siswa di jenjang pendidikan SMP : 571

Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun : 579

$$\text{APK SMP} = \frac{\text{Jumlah siswa di jenjang pendidikan SMP}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 th}} \times 100\%$$

$$\text{APK SMP} = \frac{571}{579} \times 100\% = 98,62\%$$

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa APK untuk tingkat SMP di Kersamanah sebesar 98,62%. Artinya tingkat partisipasi penduduk Kersamanah untuk tingkat SMP tergolong tinggi.

### 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD

Dari hasil pendataan diperoleh data sebagai berikut :

Jumlah siswa kelompok usia 13-15 th di jenjang pendidikan SMP : 565

Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun : 579

$$\text{APM SMP} = \frac{\text{Jumlah siswa kel. Usia 13-15 th di jenjang pendidikan SMP}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 th}} \times 100\%$$

$$\text{APM SMP} = \frac{565}{579} \times 100\% = 97,58\%$$

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa APM penduduk Kersamanah yang termasuk usia resmi SMP terutama 13-15 tahun termasuk tinggi karena tingginya persentase hasil perhitungan APM sebesar 97,58%.

Kersamanah memiliki APK dan APM yang sempurna untuk tingkat SMP, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkannya hingga mencapai 100%.

**Gambar 1. Pemetaan Wajar Dikdas 9 Tahun Desa Kersamanah**

